

**Ketegangan Sosial dalam Sejarah Pembangunan Lampung
Sebagai Sumber Pembelajaran IPS Kontekstual**

Tri Gunawan*, Sudrajat, Raras Gistha Rosardi
Universitas Negeri Yogyakarta

Email: tri1136fishipol.2024@student.uny.ac.id

<https://doi.org/10.15408/sd.v13i2.51565>

Received: 2026-05-25; Revised: 2026-08-29; Accepted: 2026-09-20

Abstrak

Pembangunan daerah kerap dipahami sebagai indikator kemajuan ekonomi, tetapi dalam praktiknya juga dapat memunculkan ketimpangan, perebutan ruang, dan ketegangan sosial. Kajian Lampung telah membahas perdagangan lada, transmigrasi, infrastruktur, konflik sosial, dan kearifan lokal, tetapi masih cenderung terpisah. Artikel ini bertujuan mengkaji ketegangan sosial dalam sejarah pembangunan Lampung serta merumuskan relevansinya bagi pembelajaran IPS. Penelitian menggunakan tinjauan literatur integratif dengan analisis historis-tematik terhadap artikel jurnal, buku, laporan, dan dokumen sejarah. Analisis dilakukan melalui identifikasi isu, pengelompokan tema, sintesis historis, perbandingan perspektif, dan analisis pedagogis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan Lampung sejak perdagangan lada, kolonisasi, transmigrasi, hingga modernisasi infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi, perkembangan permukiman, dan integrasi wilayah. Namun, proses tersebut juga mengubah struktur sosial, penguasaan ruang, komposisi penduduk, serta akses terhadap sumber daya. Dampaknya tampak pada ketimpangan lahan, kontestasi ruang, jarak sosial, dan konflik antarkelompok. Di sisi lain, piil pesenggiri dan muakhi menjadi modal kultural bagi penghormatan dan integrasi sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa sejarah pembangunan Lampung relevan sebagai sumber pembelajaran IPS kontekstual untuk mengkaji perubahan sosial, ketimpangan, konflik, multikulturalisme, integrasi, dan kearifan lokal melalui studi kasus yang dekat dengan peserta didik.

Kata kunci: Ketegangan Sosial, Pembangunan Lampung, Pembelajaran IPS, Multikulturalisme, Kearifan Lokal

Abstract

Regional development is often understood as an indicator of economic progress, yet in practice it may also produce inequality, competition over space, and social tension. Studies on Lampung have examined the pepper trade, transmigration, infrastructure, social conflict, and local wisdom, but these discussions remain fragmented. This article examines social tensions in the history of Lampung's development and formulates their relevance to social studies education. The study employed an integrative literature review with historical-thematic analysis of journal articles, books, reports, and documents. The analysis involved issue identification, thematic grouping, historical synthesis, comparison of perspectives, and pedagogical analysis. The findings show that Lampung's development, from the pepper trade, colonisation, and transmigration to infrastructure modernisation, encouraged economic growth, settlement expansion, and regional integration. However, these processes also transformed social structures, spatial control, population composition, and access to resources. Their effects included unequal land access, spatial contestation, social distance, and intergroup conflict. Meanwhile, piil pesenggiri and muakhi provided resources for respect and social integration. These findings show that Lampung's development history is relevant to contextual social studies through case studies connected to students' lives.

Keywords: Social Tension, Lampung Development, Social Studies Learning, Multiculturalism, Local Wisdom

Pendahuluan

Pembangunan daerah sering dipahami sebagai proses peningkatan ekonomi, perluasan infrastruktur, dan pemerataan akses masyarakat terhadap sumber daya. Namun, pembangunan tidak selalu menghasilkan perubahan sosial yang harmonis. Dalam banyak konteks, pembangunan juga dapat melahirkan ketimpangan, perebutan ruang, perubahan struktur sosial, dan ketegangan antarkelompok. Hal ini terjadi karena pembangunan bukan hanya proses teknis, melainkan juga proses sosial yang melibatkan relasi kuasa, distribusi sumber daya, identitas kelompok, dan pengalaman historis masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan daerah perlu dibaca secara lebih kritis, tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap relasi sosial masyarakat.

Lampung merupakan salah satu wilayah yang memperlihatkan hubungan kompleks antara pembangunan, perubahan sosial, dan ketegangan antarkelompok dalam rentang sejarah yang panjang. Sejak abad ke-17 hingga awal abad ke-20, Lampung telah terhubung dengan jaringan perdagangan regional dan kolonial melalui komoditas lada. Dalam periode tersebut, terutama pada 1653-1930, lada menempatkan Lampung sebagai

wilayah penting dalam perdagangan, tetapi sekaligus membentuk relasi yang tidak seimbang antara masyarakat lokal, elite tradisional, kesultanan Banten, VOC, dan pemerintah kolonial dalam penguasaan produksi serta distribusi hasil perdagangan (Hamid, 2024; Shadra, 2026). Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, orientasi pembangunan mengalami perubahan melalui pembangunan jalan, rel kereta api, dan pelabuhan pada 1859–1927 yang memperkuat integrasi wilayah pedalaman dengan pusat pemerintahan dan perdagangan (Ariwibowo et al., 2023). Perubahan berikutnya berlangsung sejak pelaksanaan kolonisasi pada awal abad ke-20 dan berlanjut melalui program transmigrasi setelah kemerdekaan, yang disertai pembukaan lahan pertanian dan pembentukan permukiman baru (Tirtosudarmo, 2022). Meskipun bentuk kebijakan dan aktor yang terlibat berubah dari masa kolonial ke masa pasca-kemerdekaan, terdapat kesinambungan berupa pemanfaatan ruang dan sumber daya Lampung untuk kepentingan ekonomi yang lebih luas. Proses tersebut menjadikan Lampung sebagai wilayah penting dalam sejarah pembangunan Indonesia, khususnya dalam konteks perpindahan penduduk, perubahan

penguasaan lahan, serta integrasi ekonomi antardaerah.

Perubahan tersebut meninggalkan jejak demografis dan sosial yang bertahan hingga masa kini. Program kolonisasi dan transmigrasi yang berlangsung selama lebih dari satu abad telah mengubah pola demografis Lampung dan membentuk konfigurasi etnis yang khas (Warganegara & Waley, 2022). Dinamika masyarakat multikultural tersebut antara lain tampak dalam konflik antara masyarakat Desa Agom dan Desa Balinuraga di Lampung Selatan pada 2012, yang menjadi salah satu contoh konkret ketegangan antarkelompok di Lampung (Azzahra et al., 2023).

Meskipun membawa perubahan ekonomi, proses pembangunan Lampung juga menyisakan persoalan sosial yang tidak sederhana. Program transmigrasi, misalnya, tidak hanya memindahkan penduduk dari wilayah padat ke wilayah yang dianggap masih memiliki ruang, tetapi juga mengubah komposisi demografis, pola penguasaan lahan, dan relasi antara masyarakat adat dengan kelompok pendatang. Budianto (2020) menunjukkan bahwa ketegangan sosial di Lampung pada era 1950-an muncul karena masyarakat adat merasa hak-haknya

kurang diperhatikan dalam pelaksanaan program transmigrasi. Ketegangan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penolakan terhadap pendatang, melainkan sebagai respons terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap tidak memberikan perlindungan dan keadilan yang seimbang bagi masyarakat lokal.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketegangan sosial di Lampung juga berkaitan dengan persoalan ketimpangan akses lahan, kecemburuan sosial, jarak interaksi antarkelompok, dan lemahnya integrasi sosial dalam masyarakat multikultural. Beberapa kajian menunjukkan bahwa konflik sosial di Lampung tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi berkaitan dengan sejarah panjang relasi antara penduduk asli, pendatang, negara, dan kepentingan ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut (Azzahra et al., 2023; Susetyo et al., 2024; Warganegara & Waley, 2022). Peristiwa konflik di Lampung Selatan, termasuk kasus Balinuraga, menunjukkan bahwa perbedaan etnis dapat menjadi pemicu konflik ketika bertemu dengan persoalan struktural seperti ketimpangan, stereotip, kurangnya ruang interaksi, dan akumulasi prasangka sosial (Azzahra et al., 2023; Eko & Putranto, 2021; Salim & Ruslan, 2021).

Di sisi lain, Lampung juga memiliki modal sosial dan kearifan lokal yang penting untuk membaca proses integrasi masyarakat multikultural. Nilai *piil pesenggiri* dan praktik *muakhi* menunjukkan adanya basis kultural yang dapat memperkuat penghormatan, persaudaraan, dan penyelesaian konflik dalam masyarakat Lampung (Afriyadi et al., 2024; Salim & Ruslan, 2021; Syahputra & Ruslan, 2021). Dengan demikian, sejarah pembangunan Lampung tidak hanya memuat narasi tentang konflik dan ketegangan sosial, tetapi juga menyediakan pembelajaran tentang bagaimana masyarakat membangun mekanisme integrasi, negosiasi identitas, dan penyelesaian masalah sosial melalui nilai lokal.

Kajian mengenai pembangunan Lampung dapat dikelompokkan ke dalam empat kecenderungan. *Pertama*, kajian sejarah ekonomi dan infrastruktur menjelaskan posisi lada dalam jaringan perdagangan regional dan kolonial, relasi kuasa dalam pengelolaan komoditas, serta perubahan ruang akibat pembangunan jaringan transportasi (Ariwibowo et al., 2023; Hamid, 2024; Shadra, 2026). Kelompok kajian ini memperlihatkan perubahan orientasi ekonomi dan penguasaan sumber

daya dalam lintasan sejarah Lampung, tetapi belum secara khusus menghubungkannya dengan perubahan struktur sosial dan pembelajaran IPS. *Kedua*, kajian kolonisasi dan transmigrasi membahas perubahan demografis, pembentukan permukiman, akses terhadap lahan, serta dinamika sosial dan politik yang ditinggalkan oleh kebijakan perpindahan penduduk (Budianto, 2020; Susetyo et al., 2024; Tirtosudarmo, 2022; Warganegara & Waley, 2022). Kajian-kajian tersebut memberikan penjelasan penting mengenai konsekuensi kebijakan kependudukan dan pembangunan wilayah, tetapi umumnya berfokus pada periode atau kebijakan tertentu sehingga kesinambungannya dengan sejarah ekonomi dan konflik kontemporer belum disusun secara terpadu. *Ketiga*, kajian konflik sosial menjelaskan tahapan konflik Agom–Balinuraga, peran prasangka dan komunikasi antarbudaya, serta upaya membangun perdamaian setelah konflik (Azzahra et al., 2023; Eko & Putranto, 2021; Rivaldy et al., 2022). Kontribusi kajian tersebut terletak pada penjelasan mengenai mekanisme konflik dan resolusinya, tetapi pembahasannya cenderung berpusat pada satu peristiwa sehingga akar historisnya dalam perubahan ruang, demografi, dan

distribusi sumber daya belum banyak disintesis. *Keempat*, kajian kearifan lokal menempatkan *piil pesenggiri* dan *muakhi* sebagai nilai yang mendukung penghormatan, persaudaraan, pendidikan karakter, dan pengelolaan konflik dalam masyarakat multikultural (Afriyadi et al., 2024; Salim & Ruslan, 2021; Syahputra & Ruslan, 2021). Kontribusi kelompok ini terletak pada penjelasan mengenai modal kultural masyarakat Lampung, tetapi pembahasannya belum banyak ditempatkan dalam perkembangan historis pembangunan dan ketegangan sosial.

Dalam bidang pendidikan, sejumlah penelitian telah menunjukkan potensi sejarah dan budaya lokal sebagai sumber pembelajaran. Sudrajat (2021) mengidentifikasi Candi Asu dan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar IPS yang dapat menghubungkan materi sejarah, kondisi geografis, sumber daya alam, serta perubahan masyarakat. Arrazaq dan Tanudirjo (2021) menunjukkan bahwa Prasasti Sumundul memiliki potensi sebagai sumber pembelajaran IPS karena memuat informasi sejarah yang dapat dikaitkan dengan kehidupan masyarakat setempat. Erna dan Falaq (2022) merumuskan

pengembangan sumber belajar IPS berbasis etnopedagogi melalui integrasi nilai kearifan lokal ke dalam tema dan rancangan pembelajaran. Selanjutnya, Mutiani, et al. (2023) menegaskan pentingnya memperkuat materi IPS dengan sejarah lokal dan mencontohkan sejarah Kesultanan Banjar sebagai muatan yang dapat disesuaikan dengan periodisasi sejarah nasional. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa konteks lokal dapat mendekatkan konsep IPS dengan lingkungan peserta didik, tetapi sebagian besar berfokus pada satu situs, peninggalan, nilai budaya, atau materi sejarah tertentu dan belum membahas sejarah pembangunan daerah sebagai proses sosial multidimensional.

Berdasarkan pemetaan tersebut, celah penelitian terletak pada belum tersedianya sintesis yang menghubungkan sejarah ekonomi, perubahan ruang, transmigrasi, ketegangan sosial, konflik antarkelompok, dan kearifan lokal Lampung dalam satu kerangka pembelajaran IPS terpadu. Artikel ini berbeda dari kajian sejarah lokal yang berpusat pada satu situs atau peristiwa karena menempatkan pembangunan Lampung sebagai rangkaian perubahan dan kesinambungan sejak perdagangan lada

hingga terbentuknya masyarakat multikultural. Sintesis tersebut selanjutnya ditransformasikan ke dalam perspektif sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi sebagai sumber pengembangan materi IPS kontekstual berbasis studi kasus.

Atas dasar itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji ketegangan sosial dalam sejarah pembangunan Lampung serta merumuskan relevansinya sebagai sumber pembelajaran IPS kontekstual. Kajian ini tidak hanya menempatkan Lampung sebagai objek sejarah lokal, tetapi juga sebagai ruang belajar sosial yang dapat membantu peserta didik memahami bahwa pembangunan memiliki dampak multidimensional. Melalui kasus Lampung, pembelajaran IPS dapat diarahkan untuk membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam membaca relasi antara kebijakan pembangunan, distribusi sumber daya, identitas sosial, konflik, dan integrasi masyarakat.

Manfaat kajian ini terletak pada dua aspek. Secara teoretis, artikel ini memberikan sintesis mengenai keterkaitan antara sejarah pembangunan daerah dan ketegangan sosial dalam konteks masyarakat multikultural. Secara praktis, artikel ini menawarkan dasar konseptual bagi guru IPS untuk menggunakan sejarah sosial Lampung

sebagai sumber pembelajaran kontekstual. Dengan demikian, pembelajaran IPS tidak hanya berisi konsep-konsep abstrak tentang perubahan sosial, konflik, dan multikulturalisme, tetapi juga terhubung dengan pengalaman historis masyarakat yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur integratif dengan analisis historis-tematik. Tinjauan literatur integratif dipilih karena memungkinkan peneliti menggabungkan temuan dari berbagai jenis sumber untuk membangun sintesis konseptual mengenai suatu persoalan, bukan sekadar merangkum hasil penelitian terdahulu (Lubbe et al., 2020; Snyder, 2019). Analisis historis digunakan untuk menyusun temuan berdasarkan urutan waktu serta mengidentifikasi perubahan dan kesinambungan dalam pembangunan Lampung. Pendekatan ini tidak dimaksudkan sebagai metode penelitian sejarah murni yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, tetapi sebagai cara membaca dan menghubungkan temuan dari sumber sekunder secara kronologis. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola persoalan sosial yang muncul dalam setiap periode.

Penelusuran literatur awal dilakukan pada Oktober 2025 melalui Google Scholar dan Garuda. Pemutakhiran literatur dilakukan pada Juli–Agustus 2026 selama proses revisi naskah untuk memasukkan publikasi terbaru yang relevan. Kata kunci berbahasa Indonesia meliputi “sejarah pembangunan Lampung”, “perdagangan lada Lampung”, “kolonisasi Lampung”, “transmigrasi Lampung”, “konflik sosial Lampung”, “konflik Balinuraga”, “piil pesenggiri”, “muakhi”, dan “pembelajaran IPS sejarah lokal”. Kata kunci berbahasa Inggris meliputi “Lampung development history”, “Lampung pepper trade”, “Lampung transmigration”, “Balinuraga conflict”, “Lampung local wisdom”, dan “local history in social studies education”. Penelusuran juga dilakukan melalui pemeriksaan daftar rujukan dari sumber terpilih serta verifikasi metadata pada laman jurnal penerbit. Kelengkapan penelusuran diperiksa dengan mengulang pencarian menggunakan variasi kata kunci dan menelusuri daftar rujukan hingga tidak ditemukan lagi sumber baru yang memenuhi kriteria penelitian.

Literatur substantif terbitan 2020–2026 diprioritaskan untuk memperoleh perkembangan kajian mutakhir. Kriteria

inklusi meliputi sumber berbahasa Indonesia atau Inggris, tersedia dalam teks lengkap, diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal, buku akademik, laporan lembaga, atau dokumen ilmiah, serta memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan Lampung, transmigrasi, konflik sosial, kearifan lokal, atau pembelajaran IPS berbasis sejarah lokal. Sumber dikeluarkan apabila merupakan duplikasi, tulisan populer tanpa kejelasan sumber, hanya menyebut Lampung secara sepintas, atau tidak memuat informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Seleksi dilakukan melalui pemeriksaan judul dan metadata, pembacaan abstrak, serta penelaahan teks lengkap. Berdasarkan proses tersebut, 21 sumber substantif memenuhi kriteria dan digunakan dalam analisis, sedangkan dua sumber lainnya digunakan sebagai rujukan metodologis.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. *Pertama*, mengidentifikasi periode, peristiwa, aktor, kebijakan, dan persoalan sosial yang dibahas dalam setiap sumber. *Kedua*, mengelompokkan temuan ke dalam empat tema, yaitu pembangunan ekonomi dan perubahan ruang; kolonisasi, transmigrasi, dan perubahan struktur sosial; ketegangan dan konflik sosial; serta kearifan lokal dan

integrasi masyarakat. *Ketiga*, menyusun sintesis historis dengan menghubungkan perubahan dan kesinambungan antarkurun waktu serta membandingkan perspektif pemerintah, masyarakat lokal, transmigran, dan peneliti. *Keempat*, memetakan temuan ke dalam perspektif sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi sebagai sumber pengembangan materi IPS terpadu pada Fase D. Keabsahan analisis dijaga melalui perbandingan antarsumber dan pemeriksaan kesesuaian setiap klaim dengan periode, peristiwa, dan konteks sosial yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pembangunan Lampung berlangsung melalui proses historis yang panjang, mulai dari perdagangan lada dan pembangunan jaringan transportasi kolonial, kolonisasi dan transmigrasi, hingga terbentuknya masyarakat multikultural dengan berbagai dinamika sosial. Proses tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi wilayah, tetapi juga mengubah

struktur sosial, pola penguasaan ruang, komposisi penduduk, dan hubungan antarkelompok (Ariwibowo et al., 2023; Hamid, 2024; Tirtosudarmo, 2022).

Berdasarkan sintesis historis-tematik, temuan penelitian dikelompokkan ke dalam empat tema utama. *Pertama*, pembangunan ekonomi dan infrastruktur membentuk relasi antara komoditas, kekuasaan, dan perubahan ruang. *Kedua*, kolonisasi dan transmigrasi mengubah komposisi penduduk, pola permukiman, serta akses masyarakat terhadap lahan. *Ketiga*, ketegangan dan konflik sosial muncul dalam konteks yang berbeda, termasuk ketegangan terhadap kebijakan transmigrasi pada 1950-an dan konflik Agom–Balinuraga di Lampung Selatan pada 2012 (Azzahra et al., 2023; Budianto, 2020). *Keempat*, nilai *piil pesenggiri* dan praktik *muakhi* menjadi modal kultural dalam membangun penghormatan, persaudaraan, dan integrasi sosial dalam masyarakat multikultural (Salim & Ruslan, 2021; Syahputra & Ruslan, 2021). Keempat tema tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1 Tema Utama Hasil Kajian Literatur

Tema	Fokus Kajian	Rujukan Utama
Pembangunan ekonomi dan perubahan ruang	Perdagangan lada, pembangunan transportasi, perubahan jalur mobilitas, dan terbentuknya pusat-pusat ekonomi baru	Hamid (2024); Ariwibowo et al. (2023)
Kolonisasi, transmigrasi, dan	Perubahan demografi, pembukaan lahan, pembentukan permukiman, serta relasi masyarakat lokal dan pendatang	Budianto (2020); Tirtosudarmo (2022);

perubahan struktur sosial		Warganegara dan Waley (2022)
Ketegangan dan konflik sosial	Ketegangan terhadap kebijakan transmigrasi pada 1950-an serta konflik Agom–Balinuraga pada 2012 yang berkaitan dengan prasangka, jarak sosial, dan lemahnya interaksi antarkelompok	Budianto (2020); Eko dan Putranto (2021); Azzahra et al. (2023)
Kearifan lokal dan integrasi sosial	<i>Piil pesenggiri, muakhi</i> , persaudaraan sosial, penghormatan antarkelompok, dan rekonsiliasi	Salim dan Ruslan (2021); Syahputra dan Ruslan (2021)

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan kajian literatur.

Relevansi bagi pembelajaran IPS tidak ditempatkan sebagai tema historis yang berdiri sendiri, tetapi dianalisis secara terpadu pada setiap tema. Perdagangan lada dan pembangunan transportasi dapat dikaji melalui perspektif sejarah, ekonomi, dan geografi; kolonisasi dan transmigrasi melalui perspektif demografi, ruang, dan perubahan sosial; sedangkan konflik serta kearifan lokal dapat dianalisis melalui perspektif sosiologi dan kehidupan masyarakat multikultural. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan sejarah pembangunan Lampung sebagai sumber materi pembelajaran IPS terpadu.

Sejarah Pembangunan Lampung dan Akar Ketegangan Sosial

Sejarah pembangunan Lampung tidak dapat dilepaskan dari perdagangan lada yang menghubungkan wilayah ini dengan jaringan ekonomi regional dan kolonial. Sejak abad ke-16 hingga awal abad ke-20, lada menjadi komoditas utama yang mempertemukan

masyarakat lokal, elite tradisional, Kesultanan Banten, VOC, dan pemerintah kolonial. Hubungan tersebut memperluas jaringan perdagangan dan meningkatkan posisi ekonomi Lampung, tetapi juga membentuk relasi kuasa dalam pengaturan produksi, penyerahan hasil, dan distribusi komoditas. Dengan demikian, perdagangan lada tidak hanya menciptakan kegiatan ekonomi, tetapi juga menempatkan masyarakat Lampung dalam struktur kekuasaan yang melibatkan kepentingan aktor lokal dan eksternal (Afwan, 2021; Fajarudin et al., 2020; Hamid, 2024).

Pada paruh kedua abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pembangunan Lampung mengalami perubahan melalui pengembangan jaringan transportasi. Pembangunan jalan, rel kereta api, dan pelabuhan pada 1859–1927 memperkuat hubungan antara wilayah produksi di pedalaman dengan pusat perdagangan dan pemerintahan kolonial. Infrastruktur tersebut

mempercepat mobilitas penduduk dan komoditas serta mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Namun, perubahan jalur transportasi juga mengubah kedudukan ekonomi antarwilayah. Daerah yang terhubung dengan jalan, rel, atau pelabuhan memperoleh peluang perkembangan yang lebih besar, sedangkan wilayah yang tidak terhubung mengalami penurunan peran atau berkembang lebih lambat (Ariwibowo et al., 2023).

Perubahan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus pergeseran dalam sejarah pembangunan Lampung. Pada masa perdagangan lada, penguasaan terutama berlangsung melalui kontrol terhadap komoditas dan jalur perdagangan. Pada masa kolonial berikutnya, kontrol tersebut diperkuat melalui pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang menghubungkan wilayah produksi dengan pusat ekonomi. Pembangunan membawa manfaat berupa keterhubungan wilayah dan peningkatan kegiatan ekonomi, tetapi manfaat tersebut

tidak selalu tersebar secara merata. Perubahan pusat ekonomi dan akses terhadap jaringan transportasi turut memengaruhi posisi sosial dan ekonomi kelompok-kelompok masyarakat.

Kondisi tersebut tidak berarti bahwa perdagangan lada dan pembangunan transportasi secara langsung menyebabkan konflik sosial pada periode berikutnya. Keduanya membentuk konteks historis berupa perubahan penguasaan sumber daya, orientasi ruang, dan distribusi manfaat pembangunan. Konteks ini kemudian berlanjut dan mengalami bentuk baru ketika kolonisasi dan transmigrasi mengubah komposisi penduduk, pola penggunaan lahan, serta relasi antara masyarakat lokal dan pendatang. Kronologi perubahan tersebut dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2 Kronologi Pembangunan Lampung dan Dampak Sosialnya

Periode	Bentuk Pembangunan	Dampak Sosial	Keterkaitan dengan Konsep IPS
1653–1930	Integrasi Lampung ke dalam jaringan perdagangan lada regional dan kolonial	Terbentuknya relasi kuasa antara masyarakat lokal, elite tradisional, Kesultanan Banten, VOC, dan pemerintah kolonial dalam produksi dan distribusi lada	Hubungan kegiatan ekonomi, kekuasaan, penguasaan sumber daya, dan perubahan sosial
1859–1927	Pembangunan jalan, jalur kereta api, dan pelabuhan	Perubahan jalur mobilitas dan pusat ekonomi, penguatan kontrol kolonial,	Interaksi manusia dan ruang, mobilitas, pusat pertumbuhan,

	untuk menghubungkan wilayah produksi dengan pusat perdagangan	serta munculnya ketimpangan antarwilayah	kolonialisme, dan ketimpangan wilayah
1905–1941	Kolonisasi penduduk dari Jawa, pembukaan lahan, dan pembentukan permukiman pertanian baru	Perubahan komposisi penduduk, penggunaan lahan, pola permukiman, dan relasi masyarakat lokal dengan pendatang	Migrasi penduduk, perubahan penggunaan lahan, interaksi sosial, dan perubahan struktur masyarakat
1950–1965	Pelaksanaan transmigrasi pada masa awal kemerdekaan sebagai bagian dari kebijakan kependudukan dan pembangunan pertanian	Bertambahnya penduduk pendatang, perubahan akses terhadap lahan, serta munculnya ketegangan antara sebagian masyarakat adat dan pemerintah terkait pelaksanaan transmigrasi	Kebijakan kependudukan, distribusi sumber daya, ketimpangan sosial, dan relasi masyarakat adat dengan pendatang
1969–1998	Perluasan program transmigrasi, pembukaan wilayah pertanian, dan integrasi daerah ke dalam pembangunan nasional pada masa Orde Baru	Pertumbuhan permukiman dan produksi pertanian, tetapi juga meningkatnya tekanan terhadap lahan, lingkungan, dan hubungan antarkelompok	Pembangunan ekonomi, migrasi, perubahan lingkungan, distribusi lahan, dan keadilan sosial
1998–sekarang	Perkembangan pertanian komersial, agroindustri, infrastruktur, serta kehidupan masyarakat yang semakin multikultural	Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan interaksi antarkelompok, disertai ketimpangan, konflik komunal seperti konflik Agom–Balinuraga pada 2012, dan upaya integrasi melalui nilai lokal	Masyarakat multikultural, konflik sosial, ketimpangan, resolusi konflik, piil pesenggiri, dan muakhi

Catatan: Rentang waktu dalam tabel bersifat tumpang tindih karena perdagangan, pembangunan transportasi, kolonisasi, dan perubahan sosial berlangsung secara bersamaan pada periode tertentu.

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Hamid (2024), Afwan (2021), Ariwibowo et al. (2023), Budianto (2020), Tirtosudarmo (2022), Warganegara dan Waley (2022), Azzahra et al. (2023), Salim dan Ruslan (2021), serta Syahputra dan Ruslan (2021).

Transmigrasi, Perubahan Demografis, dan Kontestasi Akses Lahan

Perpindahan penduduk ke Lampung berlangsung melalui beberapa periode dengan tujuan dan karakter kebijakan yang berbeda. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda memulai program kolonisasi pada 1905 dengan memindahkan penduduk dari Jawa ke Lampung. Setelah kemerdekaan, kebijakan tersebut dilanjutkan sebagai program transmigrasi yang diarahkan pada

pemerataan penduduk, peningkatan produksi pertanian, dan pengembangan wilayah. Pada masa Orde Baru, terutama sejak dimulainya rencana pembangunan nasional pada 1969, transmigrasi berkembang menjadi program berskala lebih luas yang menggabungkan kebijakan kependudukan, pembukaan lahan, pembentukan permukiman, dan integrasi ekonomi wilayah (Susetyo et al., 2024; Tirtosudarmo, 2022).

Dari perspektif pemerintah,

transmigrasi dipandang sebagai kebijakan strategis untuk mengurangi tekanan penduduk di Jawa, memperluas produksi pertanian, dan membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru. Kebijakan tersebut berkontribusi terhadap pembukaan wilayah, perkembangan permukiman, dan meningkatnya kegiatan ekonomi di sejumlah daerah Lampung. Bagi keluarga transmigran, perpindahan juga membuka peluang untuk memperoleh lahan dan membangun kehidupan baru, meskipun mereka harus menghadapi keterbatasan infrastruktur, proses adaptasi terhadap lingkungan, dan kebutuhan untuk membangun jaringan sosial di daerah tujuan (Pratiwi et al., 2022; Susetyo et al., 2024).

Namun, manfaat pembangunan tersebut tidak selalu dirasakan secara seimbang oleh seluruh kelompok. Pada 1950-an, sebagian masyarakat adat Lampung menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan transmigrasi karena menilai bahwa hak mereka atas tanah dan ruang hidup belum memperoleh perhatian yang memadai. Budianto (2020) menunjukkan bahwa keberatan tersebut tidak dapat dipahami sebagai penolakan mutlak terhadap pendatang, tetapi sebagai kritik terhadap kebijakan yang dinilai lebih banyak

memberikan fasilitas dan perlindungan kepada kelompok transmigran. Karena itu, ketegangan pada masa tersebut berkaitan dengan persoalan distribusi sumber daya, pengakuan terhadap hak masyarakat lokal, dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan kebijakan.

Persoalan akses lahan terus menjadi bagian penting dalam perkembangan wilayah transmigrasi. Lahan memiliki fungsi ekonomi sebagai sumber penghidupan, tetapi bagi masyarakat lokal juga berkaitan dengan identitas, hubungan sosial, dan keberlanjutan komunitas. Ketidakjelasan status tanah, tumpang tindih penguasaan, serta perbedaan antara pengakuan administratif dan klaim masyarakat dapat menimbulkan sengketa yang melibatkan warga lokal, transmigran, pemerintah, atau kawasan kehutanan. Kasus status lahan di kawasan transmigrasi Lampung Selatan menunjukkan bahwa persoalan pertanahan tidak berhenti setelah permukiman dibentuk, tetapi dapat berlangsung dalam jangka panjang ketika batas, hak, dan kewenangan tidak diselesaikan secara jelas (Wijonugroho et al., 2023).

Dari perspektif akademis kritis, transmigrasi tidak hanya dinilai berdasarkan keberhasilannya dalam memindahkan

penduduk dan membentuk kawasan pertanian baru, tetapi juga berdasarkan perubahan relasi kuasa, distribusi lahan, dan posisi politik kelompok-kelompok masyarakat. Warganegara dan Waley (2022) menunjukkan bahwa warisan transmigrasi turut membentuk konfigurasi etnis dan dinamika politik di Lampung. Sementara itu, Wijonugroho et al. (2023) memperlihatkan bahwa ketidakjelasan status dan kewenangan atas lahan dapat meninggalkan sengketa dalam jangka panjang. Selain itu, sengketa lahan di kawasan transmigrasi yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan juga perlu mempertimbangkan keterkaitan antara penataan permukiman, status lahan, dan pengelolaan ruang. Pandangan ini tidak meniadakan manfaat transmigrasi bagi pembangunan wilayah dan kehidupan keluarga pendatang, tetapi mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak dapat hanya diukur dari pertumbuhan permukiman, produksi pertanian, atau jumlah penduduk yang dipindahkan. Penilaian juga perlu mempertimbangkan keadilan distribusi sumber daya, pengakuan terhadap hak masyarakat lokal, dan keberlanjutan hubungan sosial setelah program dilaksanakan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa transmigrasi memiliki makna yang tidak sama bagi setiap aktor. Pemerintah menempatkannya sebagai instrumen pemerataan penduduk, peningkatan produksi, dan pengembangan wilayah. Bagi keluarga transmigran, program tersebut membuka kesempatan memperoleh lahan dan membangun kehidupan baru, meskipun disertai berbagai kesulitan adaptasi. Bagi sebagian masyarakat adat, pembukaan permukiman baru dapat dipandang sebagai perubahan terhadap akses lahan, ruang hidup, dan posisi mereka dalam pembangunan daerah. Adapun kajian akademis kritis menyoroti persoalan distribusi sumber daya, relasi kuasa, serta dampak jangka panjang kebijakan terhadap hubungan sosial dan politik lokal.

Dialektika tersebut memperlihatkan bahwa transmigrasi tidak tepat dipahami hanya sebagai keberhasilan pembangunan ataupun sebagai proyek marginalisasi. Program ini menghasilkan pertumbuhan permukiman, kegiatan ekonomi, kerja sama, dan jaringan sosial baru, tetapi pada kondisi tertentu juga memunculkan sengketa lahan, ketimpangan akses, dan ketegangan antarkelompok. Dampaknya bergantung pada

cara lahan dialokasikan, hak masyarakat diakui, infrastruktur disediakan, serta ruang interaksi dibangun secara setara. Dalam pembelajaran IPS, perbedaan perspektif tersebut dapat digunakan untuk melatih peserta didik menilai kebijakan pembangunan berdasarkan pengalaman dan kepentingan berbagai kelompok, bukan melalui satu narasi tunggal.

Konflik Agom–Balinuraga dan Integrasi Sosial dalam Masyarakat Multikultural

Perubahan demografis akibat kolonisasi, transmigrasi, dan migrasi swakarsa telah membentuk Lampung sebagai masyarakat multikultural. Masyarakat adat Lampung hidup berdampingan dengan kelompok pendatang dari Jawa, Bali, Sunda, Batak, Minang, dan berbagai daerah lain. Keberagaman tersebut membuka ruang bagi kerja sama dan pertukaran sosial, tetapi juga membutuhkan mekanisme integrasi yang mampu menjembatani perbedaan identitas, kepentingan, dan pengalaman historis antarkelompok.

Konflik yang menjadi fokus dalam bagian ini adalah konflik antara masyarakat Desa Agom dan Desa Balinuraga di Lampung Selatan pada 2012. Konflik tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pertentangan antara kelompok etnis Lampung dan Bali.

Peristiwa yang menjadi pemicu langsung berkembang menjadi kekerasan antarkelompok karena berlangsung dalam konteks prasangka, stereotip, jarak sosial, dan komunikasi yang lemah antara masyarakat yang hidup berdekatan. Azzahra et al. (2023) menunjukkan bahwa konflik tersebut berkembang melalui tahapan dari munculnya ketegangan, eskalasi kekerasan, hingga upaya penyelesaian. Dengan demikian, identitas etnis menjadi batas sosial yang menguat selama konflik, tetapi bukan satu-satunya penyebab terjadinya kekerasan.

Pembedaan antara pemicu dan kondisi yang memperbesar konflik penting untuk menghindari pandangan bahwa konflik merupakan akibat alami dari keberagaman. Pemicu langsung berkaitan dengan peristiwa antarwarga, sedangkan pembesaran konflik dipengaruhi oleh akumulasi prasangka, terbatasnya interaksi yang setara, dan menyebarnya informasi yang memperkuat solidaritas kelompok. Karena itu, konflik Agom–Balinuraga juga perlu dibedakan dari ketegangan terhadap kebijakan transmigrasi pada 1950-an dan sengketa agraria di wilayah lain. Setiap peristiwa memiliki aktor, latar belakang, dan karakter persoalan yang berbeda, meskipun sama-sama berlangsung dalam masyarakat yang mengalami

perubahan demografis dan sosial.

Penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan dengan menghentikan kekerasan terbuka. Pemulihan hubungan antarkelompok membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kembali komunikasi serta kepercayaan. Eko dan Putranto (2021) menunjukkan bahwa kompetensi antarbudaya dan penggunaan nilai lokal memiliki peran dalam proses negosiasi dan resolusi konflik Balinuraga. Sementara itu, Rivaldy et al. (2022) menekankan pentingnya membangun perdamaian positif yang tidak hanya berorientasi pada berakhirnya kekerasan, tetapi juga pada pemulihan relasi dan pencegahan munculnya konflik kembali.

Dalam konteks tersebut, *muakhi* dan *piil pesenggiri* dapat dipahami sebagai modal kultural untuk memperkuat integrasi sosial. Muakhi mengandung nilai persaudaraan yang memungkinkan terbentuknya ikatan sosial melampaui hubungan darah dan asal-usul kelompok. Adapun *piil pesenggiri* berkaitan

dengan kehormatan dan martabat yang diwujudkan melalui penghormatan kepada orang lain, tanggung jawab sosial, keterbukaan dalam pergaulan, dan kerja sama. Kedua nilai tersebut tidak secara otomatis menyelesaikan konflik, tetapi dapat menjadi landasan etis dan kultural untuk membangun dialog, penerimaan, serta hubungan sosial lintas kelompok (Salim & Ruslan, 2021; Syahputra & Ruslan, 2021).

Pembacaan terhadap konflik Agom–Balinuraga menunjukkan bahwa masyarakat multikultural tidak cukup hanya hidup berdampingan secara geografis. Integrasi membutuhkan ruang interaksi yang setara, komunikasi antarkelompok, mekanisme penyelesaian masalah, dan pengakuan terhadap pengalaman masing-masing kelompok. Bagi pembelajaran IPS, kasus ini dapat digunakan untuk melatih peserta didik membedakan pemicu dan akar konflik, menganalisis peran para aktor, serta menilai upaya penyelesaian konflik tanpa memperkuat stigma terhadap kelompok etnis tertentu

Tabel 3 Pemetaan Konflik Agom–Balinuraga dalam Pembelajaran IPS

Konsep IPS	Fokus Kasus	Aktivitas Pembelajaran	Nilai yang Dikembangkan
Konflik sosial	Pemicu, eskalasi, aktor, dan dampak konflik Agom–Balinuraga pada 2012	Menyusun peta konflik yang membedakan pemicu, kondisi	Berpikir kritis dan kehati-hatian dalam menilai masalah sosial

Masyarakat multikultural	Relasi antarkelompok dalam masyarakat Lampung yang majemuk	yang memperbesar konflik, aktor, dan dampaknya Menganalisis bentuk interaksi, jarak sosial, stereotip, dan ruang pertemuan antarkelompok	Penghormatan terhadap perbedaan dan sikap antistereotip
Integrasi sosial	Pemulihan komunikasi dan kepercayaan setelah konflik	Membandingkan pendekatan keamanan, dialog, negosiasi, dan rekonsiliasi	Dialog, kerja sama, dan tanggung jawab sosial
Kearifan lokal	<i>Muakhi</i> dan <i>piil pesenggiri</i> sebagai landasan hubungan sosial	Mengkaji penerapan nilai lokal dalam penyelesaian masalah sosial	Persaudaraan, penghormatan, dan tanggung jawab
Resolusi konflik	Peran pemerintah, aparat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat	Menyusun alternatif penyelesaian konflik yang berorientasi pada perdamaian positif	Empati, keadilan, dan kemampuan mengambil keputusan

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Eko dan Putranto (2021), Salim dan Ruslan (2021), Syahputra dan Ruslan (2021), Rivaldy et al. (2022), serta Azzahra et al. (2023).

Relevansi Sejarah Pembangunan Lampung sebagai Sumber Pembelajaran IPS Kontekstual

Sejarah pembangunan Lampung dapat digunakan sebagai sumber pengembangan materi IPS terpadu pada Fase D karena memuat keterkaitan antara manusia, ruang, waktu, kegiatan ekonomi, perubahan sosial, dan kehidupan multikultural. Kasus perdagangan lada, pembangunan jaringan transportasi, transmigrasi, konflik Agom–Balinuraga, serta kearifan lokal tidak hanya menghadirkan fakta sejarah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kebijakan pembangunan memengaruhi penggunaan ruang, distribusi sumber daya, hubungan antarkelompok, dan perubahan struktur masyarakat. Dengan demikian, materi ini memungkinkan peserta didik memahami pembangunan sebagai proses

multidimensional, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan terpadu dilakukan dengan membaca satu peristiwa melalui beberapa perspektif ilmu sosial. Perspektif sejarah digunakan untuk mengidentifikasi perubahan dan kesinambungan pembangunan dari waktu ke waktu. Perspektif geografi digunakan untuk menganalisis perubahan jalur transportasi, pola permukiman, penggunaan lahan, dan pusat kegiatan ekonomi. Perspektif ekonomi membantu peserta didik memahami komoditas, produksi, distribusi sumber daya, serta manfaat pembangunan. Sementara itu, perspektif sosiologi digunakan untuk menganalisis migrasi, perubahan struktur sosial, ketimpangan, konflik, multikulturalisme, dan integrasi sosial.

Bentuk pengembangannya diarahkan pada materi pembelajaran berbasis studi

kasus, bukan pada produk media atau bahan ajar siap pakai. Guru dapat menyajikan sumber sejarah, peta, data penduduk, berita, atau hasil penelitian mengenai Lampung, kemudian meminta peserta didik mengidentifikasi aktor, perubahan ruang, kelompok yang memperoleh manfaat, kelompok yang menghadapi kerugian, serta dampak sosial yang muncul. Peserta didik selanjutnya membandingkan perspektif pemerintah, masyarakat adat, transmigran, dan kelompok masyarakat lainnya sebelum menyusun kesimpulan atau alternatif penyelesaian masalah.

Kontekstualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh lokasi kasus. Bagi peserta didik di Lampung, materi dapat dikaitkan secara langsung dengan sejarah keluarga, perubahan lingkungan, keragaman penduduk, nilai budaya, dan persoalan sosial di sekitar mereka. Bagi peserta didik di luar Lampung, kasus ini dapat digunakan sebagai pembandingan untuk mengkaji pembangunan, migrasi, perubahan penggunaan lahan, konflik, atau integrasi sosial di daerah

masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran disebut kontekstual ketika peserta didik mampu menghubungkan pola yang ditemukan dalam kasus Lampung dengan realitas sosial yang mereka alami.

Pemanfaatan konflik Agom–Balinuraga perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak memperkuat stereotip etnis. Guru perlu menekankan perbedaan antara pemicu langsung dan kondisi yang memperbesar konflik, serta memberi ruang bagi berbagai perspektif. Nilai *muakhi* dan *piil pesenggiri* juga tidak diposisikan sebagai solusi tunggal, tetapi sebagai salah satu sumber nilai yang dapat mendukung dialog, penghormatan, dan integrasi sosial. Melalui pendekatan tersebut, sejarah pembangunan Lampung dapat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, empati sosial, dan kesadaran mengenai pentingnya keadilan dalam pembangunan.

Tabel 4 Transformasi Sejarah Pembangunan Lampung ke dalam Pembelajaran IPS Terpadu

Tema Sejarah Lampung	Perspektif IPS	Alternatif Aktivitas Pembelajaran	Capaian yang Diharapkan
----------------------	----------------	-----------------------------------	-------------------------

Perdagangan lada dan kekuasaan kolonial	Sejarah dan ekonomi	Menganalisis hubungan antara komoditas, aktor, produksi, dan kekuasaan	Peserta didik memahami keterkaitan kegiatan ekonomi dan relasi kuasa
Pembangunan jaringan transportasi	Geografi, sejarah, dan ekonomi	Membandingkan jalur sungai, jalan, rel kereta api, serta pelabuhan pada beberapa periode	Peserta didik menjelaskan pengaruh infrastruktur terhadap perubahan ruang dan pusat ekonomi
Kolonisasi dan transmigrasi	Geografi, sosiologi, dan ekonomi	Menganalisis kebijakan dari perspektif pemerintah, masyarakat lokal, dan transmigran	Peserta didik memahami hubungan migrasi, penggunaan lahan, perubahan sosial, dan distribusi sumber daya
Konflik Agom–Balinuraga 2012	Sosiologi	Menyusun peta aktor, pemicu, kondisi yang memperbesar konflik, dampak, dan upaya penyelesaian	Peserta didik mampu menganalisis konflik secara multiperspektif tanpa memperkuat stereotip
<i>Muakhi dan piil pesenggiri</i>	Sosiologi dan pendidikan nilai	Mendiskusikan relevansi nilai lokal dalam membangun hubungan antarkelompok	Peserta didik memahami peran budaya lokal dalam integrasi sosial

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan hasil kajian literatur.

Melalui transformasi tersebut, sejarah pembangunan Lampung tidak berhenti sebagai pengetahuan tentang masa lalu, tetapi menjadi sumber untuk menghubungkan konsep IPS dengan persoalan sosial yang nyata. Pemanfaatannya perlu disesuaikan dengan konteks peserta didik dan disajikan secara multiperspektif agar pembelajaran mampu mengembangkan pemahaman kritis, empati sosial, serta kesadaran terhadap pentingnya keadilan dalam pembangunan.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan Lampung berlangsung melalui proses historis yang panjang, mulai dari perdagangan lada, pembangunan jaringan transportasi kolonial, kolonisasi dan

transmigrasi, hingga perkembangan infrastruktur dan masyarakat multikultural. Proses tersebut mendorong keterhubungan wilayah, pertumbuhan permukiman, dan perkembangan kegiatan ekonomi. Namun, pembangunan juga mengubah pola penguasaan ruang, komposisi penduduk, struktur sosial, dan distribusi akses terhadap sumber daya. Dengan demikian, pembangunan Lampung perlu dipahami sebagai proses yang menghasilkan manfaat sekaligus konsekuensi sosial yang berbeda bagi setiap kelompok masyarakat.

Ketegangan sosial yang muncul tidak dapat dipahami sebagai akibat langsung dari keberagaman atau kehadiran pendatang. Ketegangan terhadap kebijakan transmigrasi pada 1950-an berkaitan dengan tuntutan

masyarakat adat atas perlindungan hak dan akses terhadap lahan, sedangkan konflik Agom–Balinuraga pada 2012 berkembang dari pemicu antarwarga yang diperbesar oleh prasangka, jarak sosial, stereotip, dan lemahnya komunikasi antarkelompok. Perbedaan konteks tersebut menunjukkan bahwa setiap konflik memiliki karakter, aktor, dan latar belakang tersendiri. Perbedaan perspektif juga menunjukkan bahwa transmigrasi dapat dipahami sebagai strategi pembangunan oleh pemerintah, kesempatan membangun kehidupan baru bagi transmigran, perubahan akses terhadap ruang hidup bagi sebagian masyarakat adat, serta kebijakan yang perlu dinilai secara kritis berdasarkan keadilan distribusi sumber daya dan dampak jangka panjangnya. Dalam kehidupan masyarakat multikultural, nilai *muakhi* dan *piil pesenggiri* dapat menjadi modal kultural untuk mendukung persaudaraan, penghormatan, dialog, dan integrasi sosial, meskipun tidak dapat ditempatkan sebagai satu-satunya penyelesaian terhadap persoalan struktural.

Sejarah pembangunan Lampung relevan digunakan sebagai sumber pengembangan materi IPS terpadu berbasis studi kasus pada Fase D. Perspektif sejarah

dapat digunakan untuk mengkaji perubahan dan kesinambungan; geografi untuk memahami perubahan ruang, permukiman, dan penggunaan lahan; ekonomi untuk menganalisis produksi serta distribusi sumber daya; dan sosiologi untuk membahas migrasi, ketimpangan, konflik, multikulturalisme, dan integrasi sosial. Bagi peserta didik di Lampung, kasus tersebut dapat dihubungkan secara langsung dengan lingkungan sosial dan sejarah daerahnya. Bagi peserta didik di luar Lampung, kasus Lampung dapat digunakan sebagai pembandingan untuk menganalisis persoalan serupa di daerah masing-masing. Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada penyusunan dan pengujian bahan ajar berbasis sejarah pembangunan Lampung agar penerapannya dalam pembelajaran IPS dapat diketahui secara empiris.

Daftar Pustaka

- Afriyadi, M. M., Widiati, U., Arifin, I., Ramli, M., & Maba, A. P. (2024). *Piil Pesenggiri Local Wisdom as the Base of Character Education in Social Studies Learning at Metro City Elementary School, Lampung. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 55–69. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/22417/7106>
- Afwan, B. (2021). Dampak Kebijakan Tanam

- Paksa terhadap Keadaan Sosial dan Perdagangan Lada di Lampung Tahun 1830 - 1865. *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 1(2 SE-Articles), 57–63.
<https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.16423>
- Ariwibowo, G. A., Budiman, H. G., & Listiana, D. (2023). Pembangunan Jaringan Transportasi di Lampung (1859–1927). *Purbawidya: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, 12(1), 49–69.
<https://ejournal.brin.go.id>
- Arrazaq, N. R., & Tanudirjo, D. A. (2021). Potensi Prasasti Sumundul sebagai Sumber Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). *ISTORIA : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 17(2 SE-Articles).
<https://doi.org/10.21831/istoria.v17i2.43028>
- Azzahra, F., Fajjah, A. S., & Adiansah, W. (2023). Analisis Konflik Kerusuhan Etnis Lampung dan Bali Berdasarkan Konsep Penahapan Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(1), 23–32.
<https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/44114/21579>
- Budianto, A. (2020). Ketegangan Sosial di Lampung Akibat Program Transmigrasi di Era 1950an. *Jurnal Candi*, 20(1), 18–31.
<https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/41327%0Ahttps://jurnal.uns.ac.id/candi/article/viewFile/41327/27062>
- Eko, B. S., & Putranto, H. (2021). Face Negotiation Strategy Based on Local Wisdom and Intercultural Competence to Promote Inter-ethnic Conflict Resolution: Case Study of Balinuraga, Lampung. *Journal of Intercultural Communication Research*, 50(5), 506–540.
<https://doi.org/10.1080/17475759.2021.1898450>
- Erna, D., & Falaq, Y. (2022). Sumber belajar IPS berbasis ethnopedadogy. *JIPSINDO*, 9(1 SE-Articles), 18–30.
<https://doi.org/10.21831/jipsindo.v9i1.43931>
- Fajarudin, D., Sumiyatun, & Hartati, U. (2020). *Tinjauan Historis Tentang Hubungan Lampung Dengan Banten di Bidang Politik dan Ekonomi dalam Perkembangan Masyarakat Lampung Abad 16-17 M.* Universitas Muhammadiyah Metro.
- Hamid, A. R. (2024). The Dynamics of Lampung Pepper Trade Network in 16th - 18th Century. *Buletin Al-Turas*, 30(2 SE-Articles), 145–160.
<https://doi.org/10.15408/bat.v30i2.39317>
- Lubbe, W., Ham-Baloyi, W. ten, & Smit, K. (2020). The integrative literature review as a research method: A demonstration review of research on neurodevelopmental supportive care in preterm infants. *Journal of Neonatal Nursing*, 26(6), 308–315.

- <https://doi.org/10.1016/j.jnn.2020.04.006>
- Mutiani, Handy, M. R. N., Wiyanarti, E., Abbas, E. W., Syaharudin, & Jumriani. (2023). Strengthening the Content of Local History in Social Studies. *Yupa: Historical Studies Journal*, 7(2 SE-Articles), 124–136. <https://doi.org/10.30872/yupa.v7i2.1569>
- Pratiwi, A., Matous, P., & Martinus, K. (2022). Transmigration Programs and Migrant Positions in Rural Community Knowledge Networks. *Journal of Rural Studies*, 95, 391–401. <https://www.researchgate.net>
- Rivaldy, M. F., Madjid, M. A., & Legowo, E. (2022). Perdamaian Positif dalam Konflik Kabupaten Lampung Selatan antara Etnis Lampung dengan Etnis Bali. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 136–142.
- Salim, L., & Ruslan, I. (2021). Muakhi Culture as Ethnic Conflict Management in Lampung. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 16(2), 117–128. <https://e-journal.unair.ac.id>
- Shadra, M. N. R. (2026). Political Economy of Lampung Black Pepper and Local Resistance, Colonial to Japanese Occupation. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, 6(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.22437/js.v6i1.54339>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sudrajat, S. (2021). Potensi Candi Asu sebagai sumber belajar IPS di sekolah menengah pertama. *JIPSINDO*, 8(2 SE-Articles), 150–164. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v8i2.43702>
- Susetyo, H., Febriyanto, S. A., Ardiansyah, D., Latifah, T. T., Angelina, F., Hamadi, I. G., Haq, N. I., & Fatih, N. (2024). Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 25(2). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v25i2.1034>
- Syahputra, M. C., & Ruslan, I. (2021). Nilai Kearifan Lokal Piil Pesenggiri dalam Kehidupan Masyarakat Lampung Multikultur. *Analisis Sejarah*, 15(1), 81–92.
- Tirtosudarmo, R. (2022). *From Colonization to Nation-State: The Political Demography of Indonesia*. Springer Nature.
- Warganegara, A., & Waley, P. (2022). The political legacies of transmigration and the dynamics of ethnic politics: a case study from Lampung, Indonesia. *Asian Ethnicity*, 23(4), 676–696. <https://doi.org/10.1080/14631369.2021>

1889356

Wijonugroho, P., Akib, M., Tisnanta, H., & Sumarja, F. (2023). Dispute on Land Status in the Transmigration Village Area in and Around the Forest Area in Purwotani Village South Lampung. *Jurnal Cepalo*, 7(2), 83–94. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2.3022>